

# KAJIAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP INFLASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Amanda Mastisia Rakanita dan Hadi Sasana

Universitas Diponegoro  
(mastisia@yahoo.com)

Diterima : 15 Agustus 2011, Disetujui: 21 September 2011

## ABSTRACT

Since 2001, Indonesian government has effectively run fiscal decentralisation as a strategy to accelerate development. This study aimed to see direct relationship of fiscal decentralization on economic growth and indirect influence of decentralization on growth through its impact on inflation in the province of Central Java. The analysis focused on indicators of fiscal decentralization of direct expenditure, which is the ratio of direct local government spending to direct central government expenditure. This study used data series in 2005-2010 by employing path analysis. The results showed that fiscal decentralization has positive and significant influences on inflation and economic growth. Meanwhile, the inflation was found to have positive influence on economic growth in the province of Central Java.

**Keywords:** Fiscal Decentralization, Inflation, Economic Growth and Central Java Province

## ABSTRAK

Sejak 2001, secara efektif pemerintah Indonesia telah menjalankan kebijakan desentralisasi fiskal yang luas sebagai strategi untuk mempercepat pembangunan daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal ini juga telah membawa perubahan besar dalam perkembangan belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh secara langsung desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengaruhnya secara tidak langsung pada pertumbuhan ekonomi melalui inflasi di Provinsi Jawa Tengah. Analisis desentralisasi fiskal difokuskan pada indikator pengeluaran kelompok belanja langsung, yang merupakan rasio realisasi belanja langsung pemerintah daerah terhadap realisasi belanja langsung pemerintah pusat. Penelitian ini menggunakan data series tahun 2005 sampai dengan 2010 dengan menggunakan metode analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Demikian halnya dengan inflasi yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

**Kata Kunci:** Desentralisasi Fiskal, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Provinsi Jawa Tengah.

Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan suatu langkah strategis dalam rangka memperkuat basis perekonomian daerah. Desentralisasi ialah pemisahan badan (*bodies sparated*) oleh aturan hukum dari pemerintah pusat, dimana pemerintah daerah diberi kekuasaan formal untuk memutuskan ruang lingkup persoalan publik. Bentuk desentralisasi dalam era otonomi daerah meliputi desentralisasi administratif, desentralisasi politik dan desentralisasi fiskal.

Salah satu bentuk desentralisasi yang paling banyak disoroti adalah desentralisasi fiskal. Hal ini disebabkan studi tentang desentralisasi fiskal tidak hanya menjadi ranah ekonomi, tetapi memiliki keter-

kaitan erat dengan dimensi lain seperti politik, administratif dan geografis. Selain itu, hasil studi desentralisasi fiskal seringkali tidak menghasilkan kesimpulan yang sama diantara para peneliti dan peminat desentralisasi. Ada silang pendapat pada masing-masing pihak yang memiliki argumentasi logis serta telah membuktikannya secara empiris. Dalam kaitannya dengan stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi, hasil studi dari beberapa ahli seperti Vazquez Martinez dan McNab M Robert (2006) membuktikan bahwa desentralisasi fiskal akan menimbulkan ketidakstabilan makroekonomi melalui inflasi yang kemudian akan berakibat menurunkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal serupa diungkapkan oleh *World Bank* (1997) yang menye-

butkan bahwa antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi mempunyai beberapa kemungkinan kondisi, yaitu: (1) desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan, (2) desentralisasi fiskal mempunyai dampak meningkatkan inflasi sehingga akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan dan (3) desentralisasi fiskal untuk suatu daerah bisa berdampak positif ataupun negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal tersebut tergantung kesiapan kelembagaan daerah tersebut dalam menjalankan kebijakan desentralisasi fiskal.

Lebih jauh, Feltenstein Andrew dan Shigeru Iwata (2005) menemukan hasil yang negatif atau bahkan tidak memiliki hubungan yang signifikan antara desentralisasi fiskal terhadap stabilitas makroekonomi melalui stabilitas harga. Sebaliknya, hasil studi yang dilakukan oleh Sumarsono dan Sugeng Hadi Utomo (2009) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh negatif signifikan terhadap instabilitas makroekonomi, dimana dengan adanya desentralisasi fiskal mampu menekan tingkat inflasi yang lebih rendah sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya perbedaan tersebut bukan berarti bahwa studi tentang desentralisasi fiskal sedang mengalami krisis, namun merupakan sebuah proses untuk menemukan kerangka kerja yang lebih komprehensif dan aplikatif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris pengaruh desentralisasi

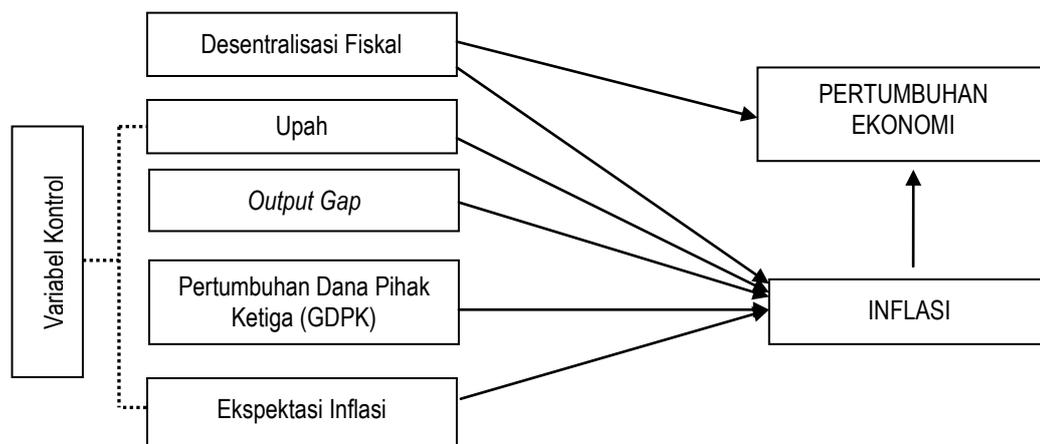
fiskal terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

### Kerangka Pemikiran Teoritis Dan Perumusan Hipotesis

Penelitian tentang desentralisasi fiskal ini akan melihat pengaruh secara langsung desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengaruhnya secara tidak langsung pada pertumbuhan ekonomi melalui inflasi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Analisis desentralisasi fiskal difokuskan pada derajat desentralisasi fiskal melalui indikator pengeluaran kelompok belanja langsung yang merupakan rasio realisasi belanja langsung pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Tengah terhadap realisasi belanja langsung pemerintah pusat, serta menggunakan satu set variabel kontrol mengikuti penelitian Aji Tony, et al (2009) yang terdiri dari kenaikan upah, kesenjangan output (*output gap*), pertumbuhan dana pihak ketiga, dan ekspektasi inflasi.

Menurut Singarimbun dan Effendi (1989), penggunaan variabel kontrol dalam suatu penelitian didasarkan agar seorang peneliti dapat mengamati hubungan antara dua variabel yang diteliti tanpa adanya gangguan dari variabel lain di luar hubungan yang hendak diteliti dan agar model yang terbentuk adalah baik serta tidak bias.

Secara sistematis hubungan antara desentralisasi fiskal terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Sumarsono dan Sugeng Hadi Utomo (2009) dengan modifikasi variabel kontrol mengikuti penelitian Aji Tony (2009)

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis

## Desentralisasi Fiskal dan Inflasi

Secara teoritis, analisa pengaruh desentralisasi fiskal terhadap inflasi dapat dijelaskan menggunakan kurva permintaan agregat (*aggregate demand*). Permintaan agregat merupakan jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh rumah tangga, perusahaan, maupun pemerintah dalam suatu perekonomian. Jumlah ini menggambarkan seluruh output riil yang akan dibeli pada setiap tingkat harga.

Miskhin (2008) menjelaskan bahwa hal pertama yang terjadi jika *aggregate demand* naik yang disebabkan karena adanya transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah, adalah penurunan persediaan (*inventor*) dari pelaku-pelaku ekonomi yang tidak direncanakan. Apabila perekonomian sangat dekat dengan output potensialnya (ketika perekonomian berada pada bagian kurva *aggregate supply* yang curam), maka perekonomian tidak dapat menaikkan output secara besar-besaran. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diusulkan sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif terhadap Inflasi

## Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Suatu pertanyaan besar apakah inflasi dapat membantu atau menghambat pertumbuhan ekonomi sudah ada dari dulu sampai sekarang terutama di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia (Rahmawati, 2011). Sehubungan dengan kaitan dampak positif antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi ada tiga pandangan yang menyatakan kemungkinan hubungan positif antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Pandangan *deliberate inflation*, beragumen bahwa sebuah kenaikan tingkat harga akan memberikan stimulus bagi segmen-segmen ekonomi yang relative produktif, memberikan profit yang lebih untuk factor-faktor yang lebih mobile dan inovatif. Pandangan *structurally inflation*, menganggap permintaan agregat (*aggregate demand*) menghasilkan kenaikan harga karena adanya *factor bottleneck*, yaitu faktor hambatan untuk menambah produksi dari sisi penawaran, seperti kuota pada perdagangan internasional, aspek transportasi, produksi makanan, dan lain sebagainya. Pandangan *surprise inflation*, yang menyatakan bahwa *surprise inflation* menjadi bagian dari pertumbuhan, karena

kenaikan harga tersebut akan diikuti oleh kenaikan produksi, dimana investor berharap kecepatan kenaikan harga belum berdampak pada sisi biaya, sehingga profit lebih meningkat. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diusulkan sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Inflasi berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi

## Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi

Berbagai argumen yang mendukung desentralisasi dikemukakan oleh Tiebout dalam Sumarsono (2009) mengatakan bahwa pelayanan publik yang paling efisien seharusnya diselenggarakan oleh wilayah yang memiliki kontrol geografis yang paling minimum. Dengan diteruskannya beberapa kewenangan pada pemerintah daerah, diharapkan pelayanan masyarakat semakin efisien karena daerah lebih mengetahui karakteristik daerahnya masing-masing, maka pengeluaran infrastruktur dan sektor sosial akan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dimana hal ini pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal. Jadi menurut pandangan ini pemerintah daerah dipercaya dapat mengalokasikan dana kepada setiap sektor ekonomi secara efisien daripada yang dilakukan pemerintah pusat.

Oates menegaskan bahwa tingkat kemajuan ekonomi merupakan outcome dari kesesuaian preferensi masyarakat dengan pemerintah daerah yang tercipta karena makin pentingnya peran pemerintah daerah dalam otonomi daerah. Secara teori, desentralisasi fiskal di perkirakan akan memberikan peningkatan ekonomi mengingat pemerintah daerah mempunyai kedekatan dengan masyarakatnya dan mempunyai keunggulan informasi dibanding pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang benar-benar dibutuhkan di daerahnya. Respon yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap tuntutan masyarakat jauh lebih cepat karena berhadapan langsung dengan penduduk daerah/kota yang bersangkutan (Wibowo, 2008).

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa beranjak dari konsep dasar dan implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia, besarnya transfer dana di daerah seharusnya memiliki korelasi yang positif terhadap

upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diusulkan sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi

## METODA PENELITIAN

### Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang atau kegiatan yang mempunyai varian tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Variabel inflasi dalam penelitian ini diprosikan dengan PDRB deflator dalam bentuk persen. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan perubahan Produk Domestik Regional Bruto menurut harga konstan yang dinyatakan dalam satuan persen. Desentralisasi fiskal diukur menggunakan indikator pengeluaran kelompok belanja langsung, yaitu rasio realisasi belanja langsung pemerintah Kabupaten / Kota Jawa Tengah terhadap realisasi belanja langsung pemerintah pusat pada tahun 2005-2010 dalam satuan desimal. Upah yang digunakan adalah upah minimum regional, yaitu upah nominal per bulan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan hidup minimum dalam nominal dan dalam ribu rupiah. Kesenjangan output (*output gap*) merupakan perbedaan antara output potensial dengan output aktual dalam bentuk persen. Output aktual diukur melalui PDRB menurut harga konstan, sedangkan output potensial diukur melalui trend secara statistic (Rahutami Angelina, 2011). Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (GDPK) diukur melalui perbandingan selisih total DPK pada satu tahun tertentu dengan total DPK tahun

sebelumnya yang dimiliki bank umum dalam satuan ukuran persen. Ekspektasi inflasi diukur melalui trend dari inflasi pada tahun 2005-2010 menggunakan satuan persen.

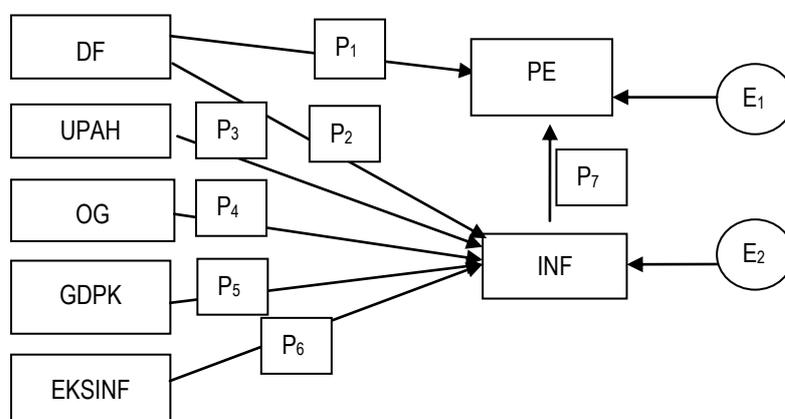
### Populasi

Dalam penelitian ini, daerah yang akan dijadikan objek penelitian adalah seluruh Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah, yaitu 29 Kabupaten dan 6 Kota dengan periodisasi waktu dari tahun 2005 sampai 2010. Dengan kata lain jumlah observasi yang digunakan adalah 210 data.

### Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (*path analysis*) yang mengacu pada penelitian Sumarsono dan Utomo (2009), dimana hal ini dikembangkan sebagai model untuk mempelajari pengaruh secara langsung maupun tidak langsung dari variabel eksogen terhadap variabel endogen. Selain itu, bentuk hubungan sebab akibat yang muncul dalam penelitian ini menggunakan model yang cukup kompleks, yaitu adanya variabel yang berperan ganda sebagai variabel independen pada suatu hubungan, tetapi menjadi variabel dependen pada hubungan yang lain. Bentuk hubungan seperti ini membutuhkan alat analisis yang mampu menjelaskan secara simultan, oleh karena itu digunakan analisis jalur (*path analysis*).

Proses perhitungan koefisien dalam analisis jalur (*path analysis*) didekati melalui analisis regresi dengan menggunakan variabel yang dibakukan (*standardize regression*). Penelitian ini menggunakan *software Amos*.



Gambar 2. Model Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Pengaruh langsung desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh P<sub>1</sub>. Sedangkan pengaruh tidak langsung desentralisasi fiskal dan variabel kontrol (upah, *output gap*/OG, pertumbuhan dana pihak ketiga/GDPK dan ekspektasi inflasi/eksinf) terhadap pertumbuhan ekonomi melalui inflasi ditunjukkan oleh P<sub>2</sub>, P<sub>3</sub>, P<sub>4</sub>, P<sub>5</sub>, P<sub>6</sub>, dan P<sub>7</sub>.

### Spesifikasi Model

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini akan menggunakan model ekonometrika sebagai berikut:

$$INF_{(t)} = \alpha_1 DF_{(t-1)} + \alpha_2 Upah_{(t)} + \alpha_3 OG_{(t)} + \alpha_4 GDPK_{(t)} + \alpha_5 Eksinf_{(t)} + \mu_{1(t)}$$

$$PE_{(t)} = \beta_1 DF_{(t-1)} + \beta_2 INF_{(t)} + \mu_{2(t)}$$

Dimana:

INF<sub>(t)</sub> : Inflasi pada tahun t

PE<sub>(t)</sub> : Pertumbuhan Ekonomi pada tahun t

DF<sub>(t-1)</sub> : Desentralisasi Fiskal pada t-1

Upah<sub>(t)</sub> : Upah minimum regional pada tahun t

OG<sub>(t)</sub> : *Output Gap* pada tahun t

GDPK<sub>(t)</sub> : Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga pada tahun t

Eksinf<sub>(t)</sub> : Ekspektasi inflasi pada tahun t

$\alpha, \beta$  : nilai koefisien jalur

$\mu$  : *error term*.

Pada penelitian ini menggunakan lag 1, karena pengaruh variabel eksogen desentralisasi fiskal terhadap variabel endogen inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak terjadi dalam waktu yang bersamaan tetapi ada selang waktu satu tahun.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengujian Asumsi Analisis Jalur (*Path Analysis*)

#### *Uji Normalitas*

Hasil pengujian normalitas secara multivariate pada Tabel 1 menunjukkan nilai CR sebesar 123,243 lebih besar dari 2,58. Hal ini menunjukkan bahwa model analisis belum menghasilkan distribusi data

**Tabel 1.** Uji Normalitas

Variabel	min	Mak	Skew	c.r.	kurtosis	c.r.
DF	0.000	0.003	0.742	4.393	1.872	5.538
UPAH	390.000	939.756	0.270	1.597	-0.740	-2.189
OG	-15.063	22.338	0.372	2.198	3.094	9.153
GDPK	-40.830	94.553	0.745	4.407	3.546	10.490
EKSINF	-31.314	70.998	1.377	8.145	1.472	4.354
INF	1.340	14.221	12.299	72.761	165.672	490.065
PE	1.727	7.442	-0.372	-2.203	0.649	1.921
<b>Multivariate</b>					<b>190.928</b>	<b>123.243</b>

Sumber: Hasil Olahan Amos

**Tabel 2.** Identifikasi *Outlier*

	Statistik Deskriptif				
	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
Zscore(DF)	210	-2.45218	4.06992	.0000000	1.0000000
Zscore(Upah)	210	-1.65185	3.11577	.0000000	1.0000000
Zscore(OG)	210	-2.92260	3.60347	.0000000	1.0000000
Zscore(GDPK)	210	-3.52164	4.57877	.0000000	1.0000000
Zscore(EKSINF)	210	-1.98028	2.89365	.0000000	1.0000000
Zscore(INF)	210	-.60586	13.68529	.0000000	1.0000000
Zscore(PE)	210	-3.43759	3.35018	.0000000	1.0000000
Valid N (listwise)	210				

Sumber: Hasil Olahan Amos

yang normal secara multivariate. Ketidaknormalan multivariate data disebabkan adanya data *outlier* dari masing-masing variabel.

Hasil identifikasi *outlier* menunjukkan bahwa sebagian besar variabel dengan observasi sebanyak 210 memiliki data ekstrim, hal ini ditunjukkan dengan nilai Z score masing-masing variabel di atas  $\pm 3$ . Untuk menghasilkan data yang berdistribusi normal, data-data ekstrim akan dikeluarkan dari model.

Uji normalitas multivariate menunjukkan nilai CR sebesar 1,596 lebih kecil dari 2,58. Hal ini menunjukkan bahwa model sudah berdistribusi dengan normal.

#### Uji Multikolinearitas

Hasil pengujian menunjukkan bahwa korelasi antar variabel menunjukkan nilai korelasi yang relatif rendah (di bawah 0,9). Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada gejala multikolinieritas diantara variabel.

**Tabel 3.** Treatment *Outlier*

	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
Zscore(PE)	177	-2.24671	2.17768	.0000000	1.0000000
Zscore(INF)	177	-1.84055	2.62610	.0000000	1.0000000
Zscore(DF)	177	-2.73222	2.81997	.0000000	1.0000000
Zscore(Upah)	177	-1.69096	2.12987	.0000000	1.0000000
Zscore(OG)	177	-2.79230	2.52879	.0000000	1.0000000
Zscore(GDPK)	177	-2.67801	2.94485	.0000000	1.0000000
Zscore(EKSINF)	177	-1.95637	2.88210	.0000000	1.0000000
Valid N (listwise)	177				

Sumber: Hasil Olahan Amos

**Tabel 4.** Hasil Treatment Uji Normalitas

Variabel	Min	Mak	Skew	c.r.	kurtosis	c.r.
DF	0	0.002	-0.011	-0.06	0.128	0.348
UPAH	390	813.4	0.139	0.755	-1.06	-2.878
OG	-8.641	11.188	-0.456	-2.474	0.491	1.333
GDPK	-19.236	58.59	0.407	2.209	0.361	0.98
EKSINF	-31.314	70.998	1.379	7.492	1.489	4.044
INF	1.34	2.487	0.238	1.295	-0.674	-1.83
PE	3.144	6.189	-0.03	-0.163	-0.612	-1.661
<b>Multivariate</b>					<b>2.693</b>	<b>1.596</b>

Sumber: Hasil Olahan Amos

**Tabel 5.** Uji Multikolinieritas

	EKSINF	GDPK	OG	UPAH	DF	INF	PE
EKSINF	1.000						
GDPK	-0.107	1.000					
OG	0.106	0.061	1.000				
UPAH	-0.615	0.071	-0.003	1.000			
DF	-0.190	-0.082	0.056	0.179	1.000		
INF	-0.479	0.014	-0.052	0.692	0.342	1.000	
PE	-0.146	0.068	0.152	0.198	0.160	0.147	1.000

Sumber: Hasil Olahan Amos

**Goodness of Fit Model Analisis Jalur (Path Analysis)**

Enam kriteria yang digunakan untuk menilai layak/tidaknya suatu model analisis jalur (*path analysis*) pada Tabel 6 menunjukkan bahwa semua kriteria terpenuhi, dengan demikian tidak perlu dilakukan modifikasi terhadap model. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model analisis jalur (*path analysis*) dapat diterima.

**Tabel 6.** Hasil Pengujian Kelayakan Model

Kriteria	Cut-off Value	Hasil Analisis	Evaluasi Model
Chi – Square		8,396	Baik
Probability	≥ 0,05	0,078	Baik
RMSE	≤ 0,08	0,079	Baik
GFI	≥ 0,90	0,987	Baik
AGFI	≥ 0,90	0,909	Baik
CFI	≥ 0,95	0,981	Baik

Sumber: Hasil Olahan Amos

**Hasil Analisis Data**

Hasil pengujian koefisien jalur desentralisasi fiskal (DF) terhadap inflasi (INF) dan pertumbuhan ekonomi (PE) ditunjukkan pada Tabel 7.

**Tabel 8.** Pengaruh Langsung Antar Variabel Penelitian

	DF	UPAH	OG	GDPK	EKSINF	INF
INF	0.224	0.622	-0.057	-0.014	-0.05	0
PE	0.124	0	0	0	0	0.104

Sumber: Hasil Olahan Amos

**Tabel 7.** Hasil Pengujian Koefisien Jalur

	Koefisien	C.R.	P	Keterangan
INF <--- DF	0.224	4.216	0,001*	Signifikan
INF <--- UPAH	0.622	9.468	0,001*	Signifikan
INF <--- OG	-0.057	-1.088	0.276	Tidak Signifikan
INF <--- GDPK	-0.014	-0.264	0.792	Tidak Signifikan
INF <--- EKSINF	-0.05	-0.745	0.457	Tidak Signifikan
PE <--- DF	0.124	1.580	0.114	Tidak Signifikan
PE <--- INF	0.104	1.320	0.187	Tidak Signifikan

Sumber: Hasil Olahan Amos. Keterangan: \*Signifikansi 5 % (0,05)

**Tabel 9.** Pengaruh Tidak Langsung Antar Variabel Penelitian

	DF	UPAH	OG	GDPK	EKSINF	INF
INF	0	0	0	0	0	0
PE	0.023	0.065	-0.006	-0.001	-0.005	0

Sumber: Hasil Olahan Amos

**Tabel 10.** Pengaruh Total Variabel Penelitian

	DF	UPAH	OG	GDPK	EKSINF	INF
INF	0.224	0.622	-0.057	-0.014	-0.05	0
PE	0.148	0.065	-0.006	-0.001	-0.005	0.104

Sumber: Hasil Olahan Amos

Persamaan model yang dihasilkan adalah:

$$INF = 0,224 DF + 0,622Upah - 0,057 OG - 0,014 GDPK - 0,05 Eksinf \quad (1)$$

$$R^2 = 0,533$$

$$PE = 0,124 DF + 0,104 INF \quad (2)$$

$$R^2 = 0,035$$

**Model Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Inflasi**

Hasil persamaan model inflasi (1) menghasilkan koefisien determinasi sebesar 0,533. Hal ini mengandung pengertian bahwa variabel inflasi dapat dijelaskan oleh variabel desentralisasi fiskal (DF) dan variabel kontrol (upah, *output gap*/OG, pertumbuhan dana pihak ketiga/GDPK, ekspektasi inflasi/EKSINF) sebesar 53,3 persen, sedangkan sisanya sebesar 46,7 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain atau variabel-variabel lain yang tidak diikuti sertakan dalam penelitian ini.

1. Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap inflasi  
 Nilai koefisien jalur desentralisasi fiskal bertanda positif sebesar 0,224 dengan nilai *Critical Ratio* (CR) sebesar 4,216 dan probabilitas signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 0,001. Dengan demikian desentralisasi fiskal berpengaruh secara langsung terhadap inflasi sebesar 0,224, yang berarti bahwa setiap ada kenaikan desentralisasi fiskal satu satuan maka akan menaikkan inflasi sebesar 0,224 persen.
2. Pengaruh variabel kontrol upah terhadap inflasi  
 Nilai koefisien jalur variabel kontrol upah bertanda positif sebesar 0,622 dengan nilai *Critical Ratio* (CR) sebesar 9,468 dan probabilitas signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 0,001. Dengan demikian variabel kontrol upah berpengaruh secara langsung terhadap inflasi sebesar 0,622, yang berarti bahwa setiap ada kenaikan upah satu satuan maka akan menaikkan inflasi sebesar 0,622 persen.
3. Pengaruh variabel kontrol output gap (OG) terhadap inflasi  
 Nilai koefisien jalur variabel kontrol *output gap* (OG) bertanda negatif sebesar 0,057 dengan nilai *Critical Ratio* (CR) sebesar -1,088 dan probabilitas signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 0,276. Dengan demikian variabel kontrol *output gap* (OG) berpengaruh secara langsung terhadap inflasi sebesar -0,057, yang berarti bahwa setiap ada kenaikan *output gap* (OG) satu satuan maka akan menurunkan inflasi sebesar 0,057 persen.
4. Pengaruh variabel kontrol pertumbuhan dana pihak ketiga (GDPK) terhadap inflasi  
 Nilai koefisien jalur variabel kontrol pertumbuhan dana pihak ketiga (GDPK) bertanda negatif sebesar 0,014 dengan nilai *Critical Ratio* (CR) sebesar -0,264 dan probabilitas signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 0,792. Dengan demikian variabel kontrol pertumbuhan dana pihak ketiga (GDPK) berpengaruh secara langsung terhadap inflasi sebesar -0,014 yang berarti bahwa setiap ada kenaikan pertumbuhan dana pihak ketiga (GDPK) satu satuan maka akan menurunkan inflasi sebesar 0,014 persen.
5. Pengaruh variabel kontrol ekspektasi inflasi (EKSINF) terhadap inflasi  
 Nilai koefisien jalur variabel kontrol ekspektasi inflasi (EKSINF) bertanda negatif sebesar 0,05

dengan nilai *Critical Ratio* (CR) sebesar -0,745 dan probabilitas signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 0,457. Dengan demikian variabel kontrol ekspektasi inflasi (EKSINF) berpengaruh secara langsung terhadap inflasi sebesar -0,05, yang berarti bahwa setiap ada kenaikan ekspektasi inflasi (EKSINF) satu satuan maka akan menurunkan inflasi sebesar 0,05 persen.

### Model Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil persamaan model pertumbuhan ekonomi (2) menghasilkan koefisien determinasi sebesar 0,035. Hal ini mengandung pengertian bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel desentralisasi fiskal (DF) dan variabel inflasi sebesar 3,5 persen, sedangkan sisanya sebesar 96,5 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain atau variabel-variabel lain yang tidak diikuti sertakan dalam penelitian ini. Dengan demikian secara umum model yang dipergunakan ini tidak cukup mampu untuk menjelaskan variasi yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi.

1. Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi  
 Nilai koefisien jalur desentralisasi fiskal bertanda positif sebesar 0,124 dengan nilai *Critical Ratio* (CR) sebesar 1,580 dan probabilitas signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 0,114. Dengan demikian desentralisasi fiskal berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,124, yang berarti bahwa setiap ada kenaikan desentralisasi fiskal satu satuan maka akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,124 persen.
2. Pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi  
 Nilai koefisien jalur inflasi bertanda positif sebesar 0,104 dengan nilai *Critical Ratio* (CR) sebesar 1,320 dan probabilitas signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 0,187. Dengan demikian inflasi berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,104, yang berarti bahwa setiap ada kenaikan inflasi satu satuan maka akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,104 persen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Inflasi

Berdasarkan hasil estimasi antara desentralisasi fiskal terhadap inflasi di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi. Hal ini mengandung pengertian bahwa semakin besar derajat desentralisasi fiskal akan menyebabkan potensi terjadinya inflasi yang semakin besar pula.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Aji, Toni et al (2009) yang menyimpulkan bahwa dengan semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal maka akan semakin bersifat inflatoir. Adanya desentralisasi fiskal akan berdampak pada kenaikan *aggregate demand* di Jawa Timur yang pada akhirnya akan berdampak pada kenaikan harga-harga barang dan inflasi.

Teori desentralisasi fiskal menemukan fenomena bahwa dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal bisa menimbulkan kondisi meningkatnya instabilitas ekonomi makro di daerah (*World Bank*, 1997). Hal ini terjadi manakala daya dukung kelembagaan yang disusun untuk menjalankan kebijakan tersebut kurang memadai. Lockwood dalam Oates (1997) menegaskan karakteristik ini, dalam konteks pendekatan ekonomi politik dari desentralisasi fiskal sebagai pengayaan teori generasi kedua, mengasumsikan bahwa kebiasaan-kebiasaan dari agen publik dan institusi politik sering kali terjadi *trade off* antara sebuah koordinasi antara tingkat sistem pemerintahan dalam otoritas publik dan preferensi respon daerah. Respon daerah yang berlebihan dalam pelaksanaan wewenang, seperti kebijakan utang dari daerah otonom kepada pihak ketiga yang berlebihan, cenderung memberikan dampak inflasi bagi ekonomi daerah.

Temuan dalam penelitian ini juga memperkuat penelitian-penelitian sebelumnya, Treisman (2000) menyimpulkan ada perbedaan antara Negara maju dengan negara berkembang, dimana desentralisasi fiskal berkorelasi dengan rendahnya inflasi untuk Negara maju dan berkorelasi dengan tingginya inflasi untuk Negara sedang berkembang. Begitu pula hasil penelitian Feltenstein Andrew dan Shigeru Iwata (2005) menyimpulkan bahwa pergeseran aktifitas

fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di China berdampak terhadap inflasi.

Secara umum, perubahan kewenangan sebagai akibat dari pelaksanaan desentralisasi fiskal, akan mempengaruhi kemampuan pemerintah pusat dalam melakukan kebijakan dan koordinasi ekonomi makro. Untuk negara sedang berkembang, kebijakan desentralisasi cenderung akan memperbesar masalah di bidang makroekonomi. Berkurangnya kewenangan pemerintah pusat pada sejumlah pengendalian anggaran belanja akan banyak mengurangi ruang geraknya untuk mengadakan pelayanan dan koordinasi aspek ekonomi publik secara langsung, sehingga pengendalian variabel ekonomi makro di tingkat sub nasional cenderung menurun. Di sisi lain adanya pelimpahan wewenang dan orientasi pemerintah daerah terhadap kepentingan lokal mengakibatkan pola hubungan antara daerah dan pusat kurang kooperatif (Tanzi, 1995).

Dalam negara yang tersentralisasi, pemerintah pusat bertanggung jawab secara eksklusif terhadap kebijakan fiskal. Sedangkan di dalam negara yang terdesentralisasi, kebijakan fiskal menjadi tanggung jawab yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Beberapa peneliti KPPD (2004) mempunyai argumentasi bahwa keuangan pemerintahan daerah lebih suka untuk memperhatikan tujuan-tujuan daerah dalam pemanfaatan sumber dayanya, misalnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) cenderung melakukan ekstensifikasi retribusi dan pajak daerah. Tanzi (1995) juga memperhatikan adanya kebijakan defisit anggaran dan melakukan kebijakan utang sebagai penyebab adanya pemicu inflasi di daerah. Adanya kebebasan peminjaman oleh daerah otonom, memungkinkan pemerintah daerah memiliki kelebihan utang yang melampaui kapasitas pengembalian kewajibannya sehingga dapat memicu meningkatnya inflasi daerah.

### Pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil estimasi antara inflasi yang direpresentasikan dengan stabilitas angka PDRB deflator terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sehubungan dengan kaitan dampak positif antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi, ada tiga pandangan yang menyatakan kemungkinan hubungan tersebut, yaitu: *Pertama*, pandangan *deliberate inflation*, beragumen bahwa sebuah kenaikan tingkat harga akan memberikan stimulus bagi segmen-segmen ekonomi yang relative produktif, memberikan profit yang lebih untuk factor-faktor yang lebih mobile dan inovatif. *Kedua*, pandangan *structurally inflation*, menganggap permintaan agregat (*aggregate demand*) menghasilkan kenaikan harga karena adanya *factor bottleneck*, yaitu faktor hambatan untuk menambah produksi dari sisi penawaran, seperti kuota pada perdagangan internasional, aspek transportasi, produksi makanan, dan lain sebagainya. *Ketiga*, pandangan *surprise inflation*, yang menyatakan bahwa *surprise inflation* menjadi bagian dari pertumbuhan, karena kenaikan harga tersebut akan diikuti oleh kenaikan produksi, dimana investor berharap kecepatan kenaikan harga belum berdampak pada sisi biaya, sehingga profit lebih meningkat.

Hasil dalam penelitian ini merujuk temuan Sumarsono dan Utomo (2009), dimana adanya hubungan positif antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi mengikuti pola *deliberate inflation*, dimana munculnya inflasi tersebut cenderung disengaja sebagai stimulus untuk sektor-sektor tertentu, terutama sektor-sektor yang cukup vital bagi masyarakat. Akan tetapi, tidak terbuktinya hubungan signifikan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah disebabkan kurang tepatnya pemerintah daerah dalam memilih sektor-sektor vital guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

### **Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan hasil estimasi antara desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut Oates (1997) desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena pemerintah sub nasional/pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik.

Pengambilan keputusan pada level pemerintah lokal akan lebih didengarkan untuk menganekaragamkan pilihan lokal dan lebih berguna bagi efisiensi alokasi. Oates juga menyatakan bahwa desentralisasi fiskal akan dapat meningkatkan efisiensi ekonomi yang kemudian berkaitan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi. Perbelanjaan infrastruktur dan sektor sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat lebih memacu pertumbuhan ekonomi daripada kebijakan pemerintah pusat. Menurut Oates, daerah memiliki kelebihan dalam membuat anggaran pembelanjaan sehingga lebih efisien dengan memuaskan kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaan daerahnya.

Tiebot dalam Sumarsono dan Sugeng Hadi Utomo (2009) mengemukakan beberapa kaidah dasar agar pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat memacu pertumbuhan ekonomi, antara lain: *Pertama*, Pemerintah daerah cenderung akan lebih efisien dalam menyediakan dan mendistribusikan barang-barang publik yang memiliki eksternalitas tidak terlalu luas, sementara untuk barang publik yang mencakup kepentingan masyarakat sangat luas dan meliputi lintas daerah, penyediaannya lebih baik dilakukan oleh pemerintah pusat karena apabila didesentralisasikan justru akan menimbulkan inefisiensi. Di samping itu perlu diperhatikan juga skala ekonomis dalam penyediaan barang publik tersebut. Artinya perlu pengaturan yang baik mengenai urusan-urusan yang menjadi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

*Kedua*, Pemerintah daerah harus lebih responsif dalam membuat keputusan pengeluaran daerah berkaitan dengan preferensi dan kebutuhan masyarakat lokal untuk mendorong terjadinya efisiensi alokasi atau efisiensi konsumsi (*allocative or consumer efficiency*). Artinya jika pemerintah daerah tidak responsif dan mengabaikan preferensi lokal, maka manfaat optimal desentralisasi fiskal dalam memacu pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi. Mendukung pendapat ini, *World Bank* menjelaskan bahwa hubungan positif antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi akan berjalan jika terdapat efisiensi ekonomi di sektor pengeluaran pemerintah (Khusaini, 2006).

*Ketiga*, perlu pengaturan fiskal yang berimbang agar dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal pemerintah daerah mampu menggali sumber-sumber

penerimaan yang memadai untuk membiayai pengeluaran daerah. Keseimbangan fiskal antara sumber-sumber penerimaan dengan kebutuhan belanja daerah akan dapat meningkatkan akuntabilitas, yang pada akhirnya akan mampu membuat perbedaan besar dalam penyediaan pelayanan lokal yang lebih efisien, berkesetaraan, berkelanjutan, dan *cost-effective*.

Hasil penelitian ini mendukung temuan empiris Prud'homme (1995) yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal tidak sepenuhnya dapat berhasil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut ada beberapa persoalan yang menjadi penyebab kegagalan desentralisasi fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi antara lain: *Pertama* pemerintah daerah tidak dapat memenuhi preferensi masyarakat lokal, baik karena tidak adanya keinginan politik, maupun disebabkan oleh aparatur yang kurang termotivasi dan atau memenuhi syarat untuk menjalankan tanggung jawab tersebut, *Kedua* meningkatnya korupsi di tingkat lokal karena umumnya politisi dan birokrat lokal lebih rentan karena mudah diakses oleh kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan. Karena itu jika pemerintah daerah mampu menghilangkan ataupun mengurangi korupsi di tingkat lokal, maka desentralisasi fiskal akan menciptakan efisiensi alokasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, *Ketiga* adanya sistem politik yang tidak demokratis, sehingga premis dasar bahwa pemerintah daerah memiliki insentif yang lebih kuat untuk menyediakan barang publik lokal secara lebih efisien mungkin tidak berlaku. Dalam sistem pemerintahan yang tidak demokratis justru terdapat pandangan yang menganggap bahwa desentralisasi fiskal hanya sebagai alat yang digunakan oleh pihak pemerintah daerah untuk mengeksploitasi sumber daya lokal dan nasional. Apabila pemerintah daerah dapat mengeliminir berbagai faktor penghambat tersebut, maka akan semakin menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengaruh tidak langsung antara desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan

ekonomi melalui inflasi menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. Hal ini mengandung pengertian bahwa semakin besar derajat desentralisasi fiskal akan menyebabkan potensi terjadinya inflasi yang semakin besar di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan, pengaruh secara langsung inflasi yang direpresentasikan dengan stabilitas angka PDRB deflator terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi cenderung disengaja sebagai stimulus sektor-sektor vital guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Dengan kata lain adanya hubungan positif antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi mengikuti pola *deliberate inflation*. Sementara pengaruh langsung desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang mungkin dapat dijadikan sebagai acuan dalam perbaikan penelitian selanjutnya. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu masih terbatas hanya pada daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu diperlukan studi yang lebih luas mengenai dampak desentralisasi fiskal terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan berbasiskan data Provinsi atau bahkan data kabupaten/kota se Indonesia.

**Saran.** Pertama, pemerintah daerah perlu lebih meningkatkan daya dukung kelembagaan yang disusun untuk menjalankan kebijakan fiskal di setiap daerah sebagai upaya untuk mengatasi ketidakstabilan makroekonomi (inflasi) di Provinsi Jawa Tengah. Kedua, Pemerintah daerah perlu lebih memperhatikan pengaturan alokasi belanja daerah yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat atau kepentingan publik sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jawa Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Anggito. (2005). *Format anggaran terpadu menghilangkan tumpang tindih*. Bapekki Depkeu.
- Adi, Priyo Hari. (2006). Hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah, belanja pembangunan

- dan pendapatan asli daerah (studi pada kabupaten dan kota se Jawa Bali). *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang.
- Aji, Tony. (2009). Dampak desentralisasi fiskal terhadap inflasi di Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 3(1), 169-176.
- Arsyad, Lincoln. (1999). *Ekonomi Pembangunan* (4<sup>th</sup> Ed). Yogyakarta: STIE YKPN.
- Asmanto, Priadi, & Soebagyo. (2007). Analisis pengaruh kebijakan moneter dan kebijakan fiskal regional terhadap stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi regional di Jawa Timur. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 4(9), 55-99.
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Jawa Tengah dalam angka*. Berbagai edisi penerbitan. BPS Jawa Tengah.
- Bank Indonesia. *Statistik ekonomi dan keuangan Indonesia*. Berbagai edisi penerbitan dan website. www.bi.go.id . Jakarta.
- Boediono. 1999. *Teori ekonomi moneter*. Yogyakarta: LPBFE.
- Endri. (2008). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1(13), 1-13.
- Feltenstein, Andrew & Shigeru Iwata. (2005). Decentralization and macroeconomic performance in China: Regional autonomy has its cost. *Journal of Development Economics*, (76), 481-501.
- Ghozali, Imam. (2008). *Model persamaan struktural konsep dan aplikasi dengan program amos*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, N Damodar. (2004). *Basic econometrics* (4<sup>th</sup> Ed). The McGraw Hill Companies.
- Gunawan, H Anton. (1991). *Anggaran pemerintah dan inflasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Haryanto, Joko., & Ester Sri Astuti. (2009). Desentralisasi fiskal dan penciptaan stabilitas keuangan daerah. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 1(13), 51-65.
- Hidayat, Syarif. (2005). *too much too soon; local states elite's perspective on the puzzle of contemporary Indonesian regional autonomy policy*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hirawan, & Bambang, Susiyati. (2007). Desentralisasi Fiskal Sebagai Suatu Upaya Meningkatkan Penyediaan Layanan Publik (Bagi Orang Miskin) di Indonesia, *Pidato*, Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam bidang Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Khusaini, Mohammad. (2006). *Ekonomi publik – desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah*. Malang: BPFE Unibraw.
- KPPOD News. (2004). *Desentralisasi ekonomi*. Jakarta Selatan.
- Kuncoro, Mudrajat. (2009). *Ekonomika Indonesia; Dinamika lingkungan bisnis di tengah krisis global*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Jhingan, ML. (2004). *Ekonomi perencanaan dan pembangunan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lestyowati, Jamila. (2009). Analisis pengaruh belanja pegawai pemerintah, investasi, jub terhadap inflasi di Indonesia. *Tesis*. Universitas Sumatera Utara.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen keuangan daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mangkoesebroto, Guritno. (2001). *Ekonomi publik*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Mankiw, N. Gregory. (2007). *Makro ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2009). *Kebijakan desentralisasi fiskal di era reformasi: 2005-2008 dalam Abimanyu, Anggito dan Megantara, Andie, Era Baru Kebijakan Fiskal; Pemikiran, konsep dan implementasi*. Kompas. Jakarta.
- Masri, Marius. 2010. Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal Regional terhadap Inflasi di Propinsi Nusa Tenggara Timur. *Tesis*. Universitas Diponegoro.
- Mulyana., (2007). *Keuangan daerah, perspektif desentralisasi fiskal dan pengelolaan APBD di Indonesia*. Jakarta: BPPK DEPKEU.
- Novi Lestari. (2009). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi pada perekonomian regional di Indonesia (studi kasus 26 provinsi di Indonesia). *Tesis*.
- Oates, W. E. (1977). *An economist's perspective on fiscal federalism*, in: W. E. Oates (ed.), *the*

- political economy of fiscal federalism*. Lexington: Toronto.
- Prud'homme, Remy.(1995). On the danger of decentralization. Washington DC, The World Bank. *Policy Research Working Paper*, 1252.
- Rahmawati.(2011). Pengaruh jumlah uang beredar, pengeluaran pemerintah, dan suku bunga terhadap tingkat inflasi di Nanggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 1(9), 177-188.
- Rahutami, Angelina. (2011). *Prinsip konstruksi model, hubungan variabel, dan dimensi analisis*. Semarang: Universitas Soegijapranata.
- Riduwan.(2004). *Statistika untuk lembaga & instansi pemerintah/swasta*. Bandung: Alfabeta.
- Rustiadi, dkk. (2007). *Perencanaan dan pengembangan wilayah*.Bogor:Institute Pertanian Bogor.
- Samuelson, A Paul dan William D Nordhus. 1997. *Ekonomi*. Ed. 12, Jakarta: Erlangga.
- Sasana, Hadi. (2009). Peran desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi di kabupaten / kota provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1(10), 103-124.
- Sasana, Hadi. (2006). Analisis dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten / kota provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Pembangunan*, 2(3), 145-170.
- Siddik, Machfud. (2009). *Kebijakan awal desentralisasi fiskal 1999-2004 dalam Abimanyu, Anggito dan Megantara, Andie, Era Baru Kebijakan Fiskal, Pemikiran, Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Kompas.
- Singarimbun, Masri, & Sofian Effendi.(1989). *Metode penelitian survai*.Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono.( 2004). *Metode penelitian bisnis*.Bandung: IKAPI.
- Sumarsono &Utumo, S.H., (2009). Deliberate inflation pada kebijakan desentralisasi fiskal Jawa Timur dan dampaknya bagi pertumbuhan daerah. *Jurnal Ekonomi Studi Pembangunan*, 3(1),2009, 157-168.
- Sumodiningrat. (1999). *Pengantar ekonometrika*. Yogyakarta: BPFE.
- Suparmoko.(1994). *Keuangan negara dalam teori dan praktek*.Yogyakarta: BPFE.
- Suryana.(2000). *Ekonomi pembangunan; problematika dan pendekatan*.Jakarta: Salemba Empat.
- Tanzi, V. (1995).*Fiscal federalism and decentralization: A review of some efficiency and macroeconomics aspects, paper prepared for the world bank's annual bank conference on development economics*. Washington, D.C.
- Todaro, P Michael & Stephen C Smith.(2006). *Pembangunan ekonomi* (Ed. 9).Jakarta: Erlangga.
- Vazquez, Martinez & McNab M Robert. (2006). Fiscal decentralization, macrostability and growth. *Revista de Economía Pública*, 179(4), 25 – 49.
- World Bank.(1997). *On line source book on decentralization and rural development*. Decentralization Thematic Team.
- Zulyanto, Aan. (2010). Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Bengkulu. *Tesis*. Universitas Diponegoro.